BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : SUARA PEMBARUAN
Subyek : Bisnis Lingkungan
Edisi : 1/ Oktober/2007
Hari : Senin
Halaman : 5

THE GLOBAL NEXUS

Politik Ekonomi Bisnis Lingkungan



Saya tiba kembali di AS untuk mencermati pembentukan F-11 atau gabungan negara berhutan tropis (Tropical Rainforest Countries) di New York, 24 September. F-11 meliputi separuh kawasan hutan tropis dunia yaitu Brasil, Kamerun, Kongo, Kolombia, Kosta Rika, Meksiko, Gabon, Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, dan Peru.

Mereka bergabung untuk memperkuat posisi tawar negara berkembang berbasis hutan alami mengatasi masalah pemanasan global. Hutan tropis disepakati sebagai warisan dunia, maka pelestariannya merupakan kewajiban bersama seluruh dunia.

Masalah pemanasan global yang ditanggulangi dengan Protokol Kyoto kurang efektif karena salah satu pelaku industri raksasa, AS, tidak bersedia mematuhi kuota emisi. Pada 3-14 Desember 2007, Indonesia akan menjadi tuan rumah dan President COP 13 di Bali. Dalam kapasitas itulah Menteri Negara Lingkungan Hidup Ir Rachmat Witoelar akan berperan melahirkan Bali Road Map, suatu dokumen kesepakatan penanggulangan pemanasan global sebagai pengganti Protokol Kyoto yang akan berakhir 2012.

u

Isu pemanasan global dan pelestarian lingkungan memang pada akhirnya menjadi masalah politik yang memerlukan kemauan politik untuk menanggulangi. Tapi realisasi program politik memerlukan dana melalui mekanisme pasar dari "komoditi yang diperdagangkan atau dipertukarkan".

Kenyataan riil ialah ada negara maju, karena faktor historis dan industrialisasi awal sudah menjadi pencemar yang melampaui proporsi ekonomi nasionalnya. Sementara negara industri baru yang sedang memasuki proses industrialisasi besar-besaran seperti RRT dan India, serta Indonesia, juga ingin mencapai tingkat industri guna menikmati pola hidup yang lebih sejahtera. Misi pelestarian hutan tropis tentu tidak bisa dibebankan hanya kepada negara pemilik hutan tanpa kompensasi ekonomi finansial.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Di sinilah para "cerdik pandai" dan ahli lingkungan menemukan mekanisme "bursa pertukaran emisi karbon". Kalau Anda memelihara dan melestarikan sekian hektare hutan yang berarti bisa mengimpaskan sekian volume emisi karbon, maka ada pabrik yang bisa menyerap dan menikmati "jatah" emisi tersebut karena "polusinya" sudah "terbayar" dengan dana kompensasi tadi. Ini semua adalah terminologi awam yang saya pakai untuk lebih gampang menjelaskan bagi orang yang kurang "paham".

Lho, polusi kok bisa diperdagangkan atau dipertukarkan. Inilah kelihaian para pakar Barat yang bisa "menguangkan" suatu masalah yang sebetulnya dulu lahir dari kepedulian sosial aktivis NGO/LSM lingkungan. Ujung-ujungnya malah bisa dijadikan duit.

Seperti juga masalah *eco-labeling*, semacam meterai yang harus dibayar oleh perusahaan negara berkembang untuk membuktikan bahwa komoditi kayu yang dijualnya diperoleh dengan cara tidak merusak lingkungan. Meterai *eco-labeling* dan Standarisasi Industri tentu tidak bisa diperoleh gratis, melainkan harus dibayar oleh produsen industrialis negara berkembang kepada badan internasional yang kompeten memberikan sertifikasi.

*

Indonesia mempunyai tokoh lingkungan kaliber global seperti Prof Dr Emil Salim dan juga punya industri berbasis kehutanan yang bisa merajai dunia. Masalah pokok bagi Indonesia ialah bagaimana kita bisa menghidupkan kembali semangat Indonesia Inc di tengah kegelisahan tentang penjualan aset nasional akibat krismon.

Laporan majalah *GLOBE* tentang peringkat pengusaha kaya dan perusahaan terbesar di Indonesia bila dicermati mengukuhkan kekhawatiran itu. Kekuatan MNC asing BUMN negara tetangga seperti Temasek dan Khazanah serta MNC global lain kembali memegang posisi strategis dalam piramida ekonomi Indonesia. Bank-bank nasional praktis sudah harus berkongsi dengan bank MNC.

Kedua, *repositioning* konglomerat kelas raksasa seperti Salim, Sinar Mas dan industrialis "murni" seperti Gudang Garam, Djarum, dan Sampoerna malah sudah melampaui kinerja saat krismon. Ketiga, masuknya pengusaha dalam arus *mainstream* penguasa politik di Indonesia, tanpa menyadari bahaya konflik kepentingan.

Pada era Orde Baru, Presiden Soeharto membentuk imperium bisnis bagi keluarga, kerabat, dan kroni. Sekarang sebagian dari kroni yang dulu dibesarkan oleh Soeharto sudah menjadi "Soeharto kecil", "Soeharto baru" dan "Soeharto kelas triliunan dalam tempo relatif lebih singkat" dari ketika Soeharto mulai giat di bisnis pada dasawarsa kedua kepresidenan atau sekitar 1985.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Para anggota DPR dan politisi juga mulai tidak malu-malu mengklaim profesi sebagai pengusaha. Memang tidak ada yang salah dalam demokrasi bahwa "penguasaha" jadi penguasa politik. Tapi demokrasi liberal di AS dan Eropa sangat ketat dan lugas memantau dan mengelola agar asas konflik kepentingan dijaga, diawasi, dicegah dan ditindak menurut hukum untuk mengawal dan melindungi kepentingan publik.

*

Penyakit Indonesia dan negara berkembang korup lain ialah, terjadi pencampuradukan antara kuasa politik dan kepentingan sempit bisnis pribadi dan keluarga. Putusan dan kebijakan yang menyangkut kepentingan umum, menjadi sekunder, dikalahkan oleh ambisi dan keserakahan untuk memenangkan diri sendiri, bisnis pribadi, dan keluarga. Akibatnya barangkali dalam suatu periode *incumbency*, sang pengusaha merangkap penguasa bisa melakukan terobosan, akuisisi, ekspansi bisnis besar-besaran berdasarkan lisensi istimewa.

Tapi, bila terjadi pergantian rezim kabinet atau peralihan dari satu partai ke partai lain, maka rezim baru akan menyita dan menghukum mantan "penguasaha" itu. Akibatnya secara nasional Indonesia tidak akan pernah memiliki perusahaan sekelas Exxon atau Mitsubishi. Karena perusahaan selalu berada pada posisi sapi perah, kambing hitam, atau babi potong yang setiap saat bisa disembelih oleh penguasa bercokol yang wawasannya cetek dan tidak mempunyai visi nasional strategis.

Semua kelemahan dalam pengambilan putusan akibat konflik kepentingan dan dominasi unsur politik (dengan huruf kecil) karena hanya berorientasi kesempitan, akhirnya akan merugikan negara secara keseluruhan. Politik Indonesia tidak pernah dipimpin oleh POLITIK -dengan huruf besar- untuk menciptakan kekuatan Indonesia Inc yang tangguh dan mampu ber-saing.

Hal-hal yang mestinya dikembangkan dengan semangat nasionalisme, Indonesia Inc dan daya saing nasional, dikebiri oleh kepentingan sempit. Sebaliknya hal-hal yang melindungi korupsi, koruptor, pelanggaran HAM, malah dibanggakan dengan dalih nasionalisme antiasing, dan seterusnya.

Akibatnya yang terjadi ialah di bidang yang seharusnya kita kuat, BUMN strategis dan konglomerat kelas global, kita dipecundangi oleh saingan dari negara tetangga dan MNC. Sedangkan di bidang korupsi, fitnah, *impunity* terhadap praktik korupsi dan kejahatan terhadap kemanusiaan kita bersikap dungu, dangkal dan konyol, karena tidak pernah menyelesaikan korupsi secara melembaga, tuntas dengan kelembagaan preventif dan strategik jangka panjang.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Walhasil, dalam soal politik, ekonomi dan bisnis lingkungan ini pun, kalau kita tidak lihai dan canggih bermain secara profesional, maka yang menikmati mungkin bukan orang dan pengusaha atau NGO Indonesia, melainkan orang, perusahaan, dan LSM global. Dalam konteks itulah Global Nexus Institute akan menyelenggarakan konferensi di Washington DC pada 1 November 2007 bertema "Toward A Bali Road Map After Kyoto".

Apa yang bisa dilakukan pelaku Indonesia dalam kancah percaturan geopolitik sektor lingkungan secara proaktif untuk kepentingan nasional Indonesia?

Penulis adalah pengamat masalah nasional dan internaional

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup